

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan menjadi masalah utama yang ingin dituntaskan oleh berbagai negara di seluruh dunia. Negara Indonesia tentunya menghadapi permasalahan ini dan berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang berasal dari faktor ekonomi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya yang paling mendasar seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan (Leonita *et al*, 2019)

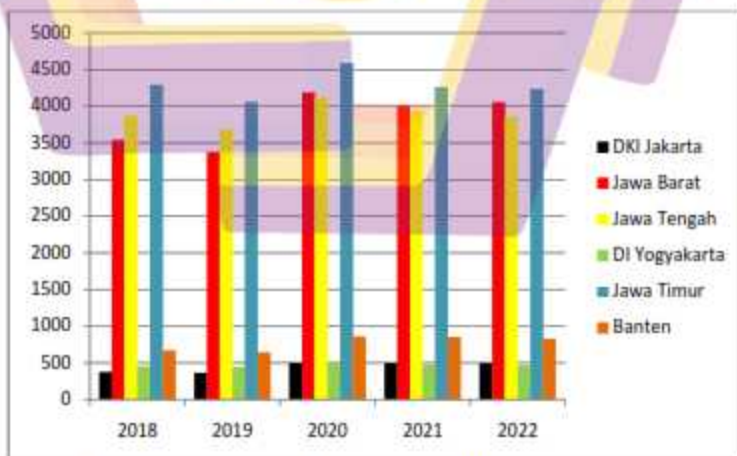
Kemiskinan merupakan salah satu indikator tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara maupun wilayah (Salqaura, 2020). Semakin tinggi jumlah penduduk miskin mencerminkan makin rendahnya tingkat kesejahteraan negara tersebut. Kemiskinan terkadang juga berarti tidak tersedianya akses terhadap pendidikan maupun pekerjaan yang nantinya mampu menurunkan permasalahan kemiskinan dan memperoleh kehormatan yang layak bagi semua warga negara (Niara *et al*, 2019). Setiap negara atau wilayah memiliki jumlah atau persentase penduduk miskin yang berbeda-beda.

Data BPS (2022) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 26.360.000 jiwa atau sekitar 9,57% dari jumlah penduduk di Indonesia, meningkat 2.000.000 jiwa atau sekitar

0,03% terhadap Maret 2022. Termasuk jumlah atau angka yang tinggi bagi suatu negara. Pemerintah perlu terus mengurangi jumlah angka penduduk miskin ini agar masyarakat di Indonesia dapat mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Pulau Jawa merupakan bagian dari Indonesia yang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Pulau Jawa memiliki 6 Provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa timur dan Banten. Berdasarkan data BPS pada September 2022, jumlah total penduduk miskin di Pulau Jawa ini sebanyak 13.936.580 jiwa. Namun demikian, jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut merupakan grafik perkembangan jumlah penduduk miskin di 6 Provinsi yang berada di Pulau Jawa pada tahun 2018-2022.

Grafik 1.1.
Jumlah Penduduk Miskin
di Pulau Jawa 2018 – 2022 (ribu jiwa)

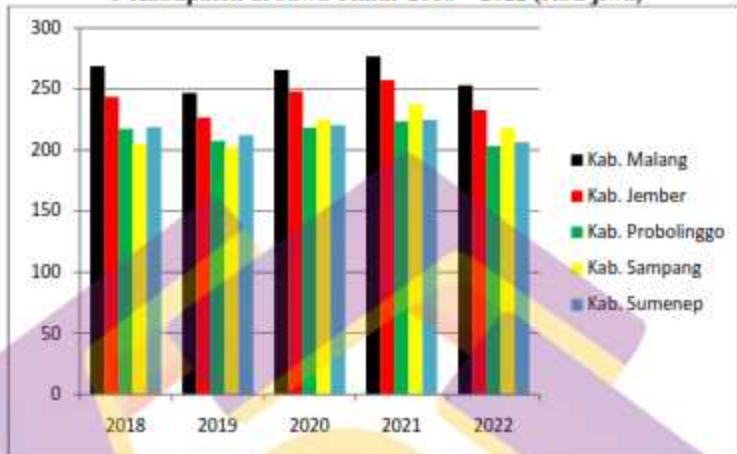


Sumber : BPS Kemiskinan dan Ketimpangan (2018 - 2022)

Berdasarkan grafik 1.1, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi dari tahun 2018 – 2022. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur sebesar 4.292.150 jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 3.867.420 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 4.056.000 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 3.679.400 jiwa dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4.585.970 jiwa, lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 4.188.520 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 4.259.600 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 4.004.860 jiwa.

Pada tahun 2022, kembali mengalami penurunan menjadi 4.236.510 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 4.053.620 jiwa. Provinsi Jawa Timur memiliki 38 Kabupaten/Kota, dengan total jumlah penduduk miskin terbanyak di Pulau Jawa pada tahun 2018-2022 ini menunjukkan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Jawa Timur masih tersebar luas di semua Kabupaten/Kota didalamnya. Tingginya jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur perlu diperhatikan oleh pemerintah agar jumlah tersebut dapat berkurang dan masyarakat mendapatkan kesejahteraan. Berikut merupakan grafik perkembangan jumlah penduduk miskin di 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

Grafik 1.2.
Jumlah Penduduk Miskin
5 Kabupaten di Jawa Timur 2018 – 2022 (ribu jiwa)

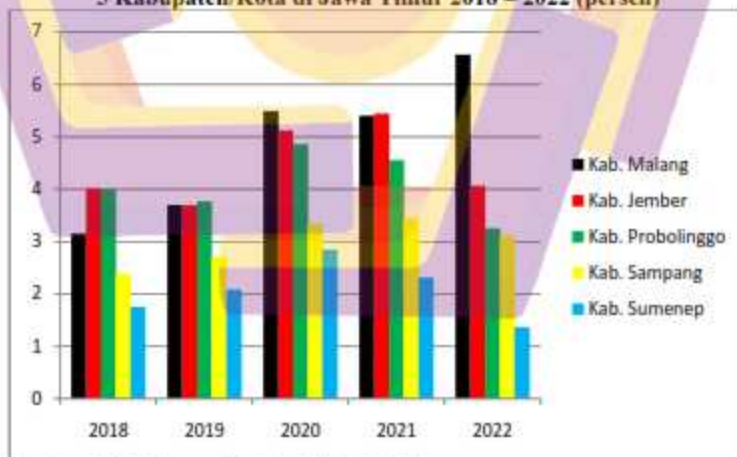


Sumber : BPS Kemiskinan dan Ketimpangan (2018 - 2022)

Berdasarkan grafik 1.2, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin tertinggi keempat pada tahun 2022 di Provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2018, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep sebesar 218.600 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 217.060 jiwa. Kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 211.980 jiwa, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jember yang berjumlah 226.570 jiwa. Pada tahun 2020, mengalami kenaikan menjadi 220.230 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 218.350 jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan menjadi 224.730 jiwa, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Probolinggo yang berjumlah 223.320 jiwa.

Pada tahun 2022, mengalami penurunan menjadi 206.200 jiwa, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 217.970 jiwa. Akar permasalahan kemiskinan berkaitan dengan keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung pada kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Pengangguran merupakan masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Berikut merupakan grafik perkembangan tingkat pengangguran di 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

Grafik 1.3.
Tingkat Pengangguran Terbuka
5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2018 – 2022 (persen)



Sumber : BPS Tenaga Kerja (2018 – 2022)

Berdasarkan grafik 1.3, menunjukkan bahwa Kabupaten Sumenep memiliki persentase pengangguran paling rendah di antara 5 Kabupaten tersebut pada tahun 2018-2022. Pada tahun 2018, persentase pengangguran di Kabupaten Sumenep sebesar 1,75%, lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 2,38%. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 2,08% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 2,71% dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 2,84% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 3,35%. Pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,31% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 3,45% dan pada tahun 2022 kembali mengalami penurunan menjadi 1,36% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 3,11%.

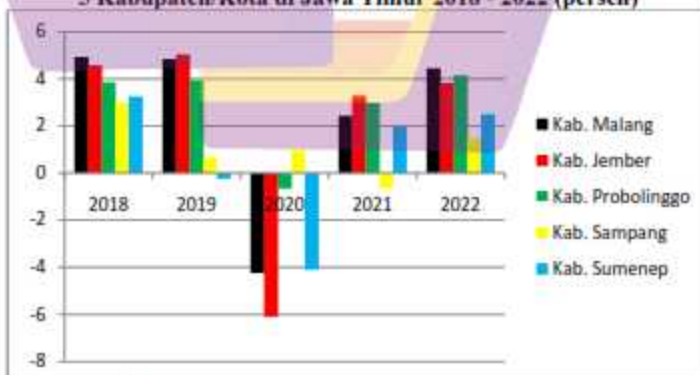
Pengentasan kemiskinan dan pengangguran menjadi indikator penting dari keberhasilan pembangunan. Pembangunan ekonomi menjadi salah satu tujuan utama bagi setiap negara, terutama untuk negara berkembang (Azim *et al.*, 2022). Kenaikan pembangunan ekonomi suatu negara merupakan kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Peningkatan kegiatan ekonomi di berbagai sektor akan memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja, sehingga diharapkan peningkatan pendapatan, serta kesejahteraan masyarakat dapat diperbaiki.

Menurut Somba *et al* (2021), pembangunan ekonomi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau wilayah. Pada umumnya

pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan (Andiaskiton, 2019). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu Negara atau suatu daerah (Umiyati, 2014).

Pertumbuhan ekonomi atau perubahan PDRB merupakan syarat penting (*necessary condition*) dalam pembangunan, dan penurunan kemiskinan sebagai syarat cukup (*Sufficient condition*) (Kamaruddin *et al*, 2018). Indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu wilayah atau daerah ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah atau daerah tersebut. Berikut merupakan grafik perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di 5 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018-2022.

Grafik 1.4.
Laju Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2010
5 Kabupaten/Kota di Jawa Timur 2018 - 2022 (persen)



Sumber : BPS Produk Domestik Regional Bruto (2018 – 2022)

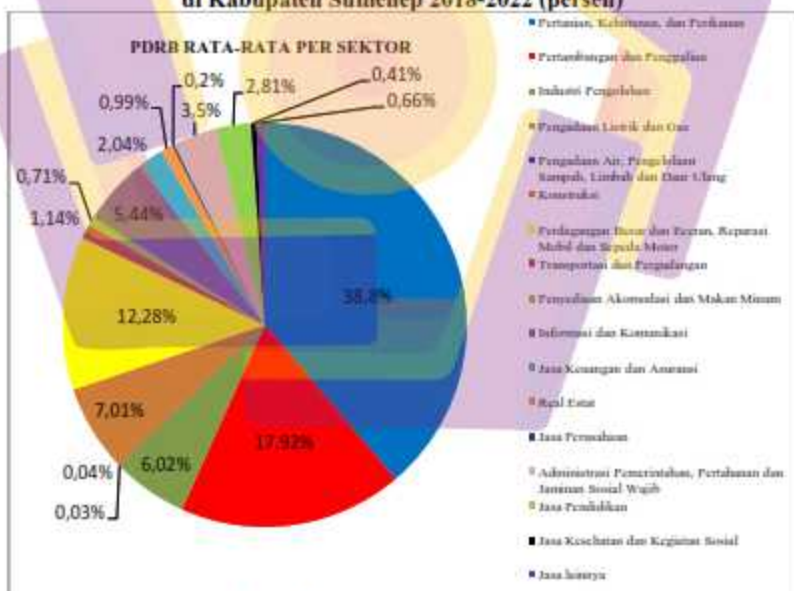
Berdasarkan grafik 1.4, pada tahun 2018 persentase PDRB Kabupaten Sumenep sebesar 3,25%, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 2,99%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup drastis menjadi -0,23% jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Jember yang berjumlah 5,03% dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan yang cukup besar menjadi -4,09% lebih rendah dibandingkan Kabupaten Probolinggo yang berjumlah -0,64%. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar menjadi 1,98% lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah -0,62% dan pada tahun 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi 2,49% lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Sampang yang berjumlah 1,47%.

Proses lajunya pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditunjukkan dengan menggunakan tingkat pertambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), sehingga tingkat perkembangan PDRB per kapita yang dicapai masyarakat seringkali sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai cita-cita untuk menciptakan pembangunan ekonomi. Secara makro, pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Besar kecilnya pertumbuhan ekonomi sangat tergantung dari produktivitas 17 sektor ekonomi yang membentuk PDRB menurut lapangan usaha suatu daerah.

Sektor ekonomi yang berjumlah 17 ini meliputi : (1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, (2) Pertambangan dan Penggalian, (3) Industri Pengolahan, (4) Pengadaan Listrik dan Gas, (5) Pengadaan Air, Pengelolaan

Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (6) Konstruksi, (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, (8) Transportasi dan Pergudangan, (9) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, (10) Informasi dan Komunikasi, (11) Jasa Keuangan dan Asuransi, (12) Real Estat, (13) Jasa Perusahaan, (14) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, (15) Jasa Pendidikan, (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta (17) Jasa lainnya. Berikut merupakan diagram rata-rata kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Sumenep dari tahun 2018-2022.

Grafik Diagram 1.5.
Kontribusi PDRB Rata-rata Per Sektor
di Kabupaten Sumenep 2018-2022 (persen)



Sumber : Data diolah PDRB Kabupaten Sumenep Menurut Lapangan Usaha (2018-2022)

Berdasarkan diagram 1.1, menunjukkan 17 sektor lapangan usaha dan terdapat 3 sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap rata-rata PDRB Kabupaten Sumenep pada tahun 2018-2022, antara lain sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 38,8%. Produk komoditas hasil pertanian yang menjadi unggulan di Kabupaten Sumenep di antaranya adalah padi, jagung, cabai jamu, kelor, kelapa, bawang merah, cabai rawit, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Produk hasil kehutanan di Kabupaten Sumenep adalah per-kayuan seperti kayu gelondongan (baik yang berasal dari hutan rimba maupun hutan budidaya), kayu bakar, rotan, bambu, dan hasil hutan lainnya. Produk hasil perikanan di Kabupaten Sumenep adalah perikanan air laut, air tawar dan air payau seperti segala jenis ikan, *crustacea*, *mollusca*, rumput laut, dan biota air lainnya (PDRB Kabupaten Sumenep, 2018-2022)

Sektor Pertambangan dan Penggalan sebesar 17,92%, meliputi pertambangan minyak dan gas bumi (migas), pertambangan batubara dan lignit, pertambangan bijih logam serta pertambangan dan penggalan lainnya. Sub kategori pertambangan migas dan panas bumi meliputi kegiatan produksi minyak bumi mentah, pertambangan dan pengambilan minyak dari serpihan minyak dan pasir minyak dan produksi gas alam serta pencarian cairan hidrokarbon. Pertambangan batubara mencakup usaha operasi penambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, *bituminous* dan *subbituminous*.

Sub kategori bijih logam mencakup pertambangan dan pengolahan bijih logam yang tidak mengandung besi, seperti bijih thorium dan uranium, aluminium, tembaga, timah, seng, timah hitam, mangan, krom, nikel kobalt dan lain. Sub kategori pertambangan & penggalian lainnya meliputi jenis barang galian seperti batu-batuan, pasir dan tanah yang pada umumnya berada pada permukaan bumi. Hasil dari kegiatan ini adalah batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu karang, batu marmer, pasir untuk bahan bangunan, pasir silika, pasir kwarsa, kaolin, tanah liat, dan komoditi penggalian lainnya, serta komoditi garam hasil penggalian (PDRB Kabupaten Sumenep, 2018-2022)

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,28%. Kategori ini meliputi kegiatan ekonomi/lapangan usaha di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor. Sub kategori ini mencakup semua kegiatan (kecuali industri dan penyewaan) yang berhubungan dengan mobil dan motor, termasuk lori dan truk, sebagaimana perdagangan besar dan eceran, perawatan dan pemeliharaan mobil dan motor baru maupun bekas. Termasuk perdagangan besar dan eceran suku cadang dan aksesoris mobil dan motor.

Sub kategori perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor mencakup kegiatan ekonomi di bidang perdagangan besar dan eceran (yaitu penjualan tanpa perubahan teknis) dari berbagai jenis barang, baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran dan merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan selain produk mobil dan sepeda motor. Perdagangan besar nasional dan internasional atas usaha sendiri atau atas dasar balas jasa atau kontrak (perdagangan komisi) juga merupakan cakupan dalam sub kategori ini (PDRB Kabupaten Sumenep, 2018-2022)

Kabupaten Sumenep perlu meningkatkan daya saingnya dengan mengembangkan sektor unggulan sehingga dapat mendorong ekonomi daerah. Konsep daya saing yang diterapkan harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya agar upaya pengembangannya lebih efektif. Sektor unggulan merupakan penggerak utama pertumbuhan di suatu wilayah, dan semakin besar penawaran (*supply*) ekonomi dari suatu wilayah ke wilayah lain, maka semakin maju pertumbuhan daerah tersebut. Peran sektor unggulan ini akan mempengaruhi perkembangan sektor non basis ke sektor basis, sehingga dapat berperan sebagai *multiplier effect* (Trismayanti, 2023). Kabupaten Sumenep memiliki sektor unggulan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain, hal ini dikarenakan letak wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki.

Sektor non unggulan adalah sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh suatu daerah. Kegiatan sektor non unggulan merupakan kegiatan

yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam wilayah ekonomi yang bersangkutan tanpa melakukan ekspor ke luar wilayah karena kemampuan sektor tersebut hanya mampu untuk mencukupi kebutuhan wilayah tersebut. Luas lingkup produksi dan pemasarannya hanya sampai pada tingkat lokal wilayah tersebut. Kabupaten Sumenep memiliki sektor non unggulan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain. Pada akhirnya, setiap daerah memiliki sektor unggulan dan sektor non unggulan yang berbeda-beda

Kabupaten Sumenep memiliki 7 sektor ekonomi yang berkontribusi paling rendah terhadap PDRB Rata-rata pada tahun 2018-2022 seperti pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,04%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,71%, real estat sebesar 0,99%, jasa perusahaan sebesar 0,2%, jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 0,41%, serta jasa lainnya sebesar 0,66%. Kabupaten Sumenep harus menentukan sektor yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, sehingga perlu dilakukan pengkajian potensi ekonomi dengan menentukan sektor unggulan. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait pengaruh variabel bebas sektor unggulan dan sektor non unggulan terhadap kemiskinan di Kabupaten Sumenep, maka penelitian ini mengambil judul "Analisis Sektor Unggulan Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Sumenep".

1.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Sumenep memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, namun memiliki tingkat pengangguran yang paling rendah dibandingkan Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Sampang. Kabupaten Sumenep memiliki laju pertumbuhan PDRB yang tidak stabil, mengalami kenaikan dan penurunan pada tahun 2018-2022. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih mendalam terkait upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Hal ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimana peran sektor ekonomi unggulan dan non unggulan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Berdasarkan latar belakang yang diambil, pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran sektor unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep?
2. Bagaimana peran sektor non unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran sektor unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui peran sektor non unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun beberapa manfaat penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai tugas akhir dan salah satu syarat kelulusan serta memperoleh gelar sarjana di Universitas Amikom Yogyakarta. Penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti terkait pengaruh sektor unggulan dan non unggulan dalam pengentasan kemiskinan di suatu daerah serta macam-macam sektor unggulan yang berkontribusi.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang bagaimana sektor unggulan dan non unggulan dapat mengurangi tingkat kemiskinan untuk mensejahterakan masyarakat dan macam-macam sektor unggulan yang ada.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi bagi mahasiswa terkait bahasan sektor unggulan beserta macam-macamnya, sektor non unggulan, dan kemiskinan.

4. Bagi Pemerintahan

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan bahan perbandingan dalam membuat kebijakan untuk memanfaatkan sektor

unggulan dan sektor non unggulan dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Sumenep.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penelitian yang disusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang uraian landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai jenis dan sumber data, objek penelitian, definisi operasional variabel penelitian dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil analisis data yang diperoleh dari perhitungan dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan uraian tentang kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan saran.